



BEYOND PHILANTHROPY: DECOUPLING AND GREENWASHING DALAM PELAPORAN CSR SERTA PERSPEKTIF INSTITUSIONALISME KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Noufal Muksalmina

Universitas Agama Islam Tazkia Bogor
Nopalll639@gmail.com

Riski Maulana

Universitas Agama Islam Tazkia Bogor
rizkimaulna2610@gmail.com

Abstract. This study aims to evaluate the quality, transparency, and integrity of Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure practices in the conventional and Islamic banking sectors in Indonesia and Malaysia. Using the lens of Institutional Theory, this study examines how differences in regulatory pressure, namely the mandatory model through POJK 51/2017 in Indonesia and the Value-based Intermediation (VBI) framework in Malaysia affect corporate reporting behavior. Through a descriptive quantitative approach and comparative content analysis of annual reports and sustainability reports for the 2019–2020 period, the level of disclosure was measured using the Global Reporting Initiative (GRI) and Islamic Social Reporting (ISR) indices.

The findings reveal significant differences in reporting priorities and depth triggered by each country's regulatory structure. Banking in Malaysia shows a higher level of maturity in environmental and governance (ESG) aspects as a result of the systematic implementation of VBI, although this market structure also creates loopholes for greenwashing through sophisticated green narratives.

In contrast, Indonesian banks, particularly Islamic banks, show excellence in the dimensions of philanthropy and community engagement based on Maqasid Syariah. However, this study also finds indications of decoupling, where legal formalism in Indonesia tends to encourage superficial administrative compliance, so that CSR disclosure often serves only as a symbolic legitimization tool rather than a substantive commitment.

Overall, these results confirm that regulatory pressure is crucial in determining whether CSR disclosure will be honest transparency or merely a corporate image strategy.

Keywords: CSR, Indonesia, Malaysia, Islamic Banking, VBI, ISR Index, ESG.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas, transparansi, serta integritas praktik pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada sektor perbankan konvensional dan syariah di Indonesia dan Malaysia. Dengan menggunakan lensa Teori Institusional, studi ini membedah bagaimana perbedaan tekanan regulasi, yakni model mandatori melalui POJK 51/2017 di Indonesia dan kerangka Value-based Intermediation (VBI) di Malaysia mempengaruhi perilaku pelaporan korporasi. Melalui pendekatan kuantitatif deskriptif dan analisis konten komparatif pada laporan tahunan serta keberlanjutan periode 2019–2020, tingkat pengungkapan diukur menggunakan indeks Global Reporting Initiative (GRI) dan Islamic Social Reporting (ISR).

Temuan penelitian mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam prioritas dan kedalaman pelaporan yang dipicu oleh struktur regulasi masing-masing negara. Perbankan di Malaysia menunjukkan tingkat kematangan yang lebih tinggi dalam aspek lingkungan dan tata kelola (ESG) sebagai hasil dari implementasi VBI yang sistematis, meskipun struktur pasar tersebut juga menciptakan celah bagi fenomena greenwashing melalui narasi hijau yang canggih. Sebaliknya, perbankan di Indonesia, khususnya bank syariah, menunjukkan keunggulan pada dimensi filantropi dan keterlibatan komunitas berbasis Maqasid Syariah.

BEYOND PHILANTHROPY: DECOUPLING AND GREENWASHING DALAM PELAPORAN CSR SERTA PERSPEKTIF INSTITUSIONALISME KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan indikasi decoupling, di mana formalisme hukum di Indonesia cenderung mendorong kepatuhan administratif yang superfisial, sehingga pengungkapan CSR sering kali hanya berfungsi sebagai alat legitimasi simbolis daripada komitmen substantif. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa tekanan regulator sangat menentukan apakah pengungkapan CSR akan menjadi transparansi yang jujur atau sekadar strategi pencitraan korporasi.

Studi ini memberikan kontribusi pada literatur akuntansi sosial dengan memberikan perspektif komparatif regional tentang bagaimana standar lokal dan nilai-nilai etika syariah berinteraksi dengan tren keberlanjutan global di Asia Tenggara.

Kata Kunci: *CSR, Indonesia, Malaysia, Perbankan Syariah, VBI, Indeks ISR, ESG.*

1. ENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Urgensi

Selama dekade terakhir, CSR telah bertransformasi dari sekadar aksi filantropi sukarela menjadi instrumen krusial dalam arsitektur tata kelola global. Namun, di balik retorika "pembangunan berkelanjutan", terdapat jurang yang menganga antara diskursus publik perusahaan dengan realitas operasional mereka. Fenomena ini dikenal sebagai *decoupling*, yaitu suatu kondisi di mana organisasi mengadopsi struktur formal secara simbolis untuk memenuhi ekspektasi eksternal namun tetap mempertahankan aktivitas teknis yang tidak berubah.

Indonesia dan Malaysia memberikan laboratorium yang unik untuk studi komparatif ini. Indonesia, dengan pendekatan "pemaksaan" melalui UU No. 40 Tahun 2007, mencoba menginstitusionalisasikan CSR secara legalistik. Sebaliknya, Malaysia mengandalkan kekuatan pasar dan bursa efek (Bursa Malaysia) dengan kerangka kerja yang lebih halus namun menuntut. Pertanyaannya kemudian: *Apakah perbedaan rezim regulasi ini benar-benar menghasilkan perubahan substantif, ataukah keduanya hanya melahirkan variasi baru dari praktik greenwashing?*

Akan tetapi sebelum membahas itu, kita semua tentunya tahu bahwa sektor perbankan memainkan peran kritis dalam menopang perekonomian global, terutama di negara-negara berkembang seperti Malaysia dan Indonesia. Selain tugas tradisionalnya sebagai perantara keuangan, bank-bank juga dihadapkan pada tantangan untuk menerapkan praktik keberlanjutan yang bertanggung jawab. Pelaporan keberlanjutan kini semakin menjadi fokus bagi berbagai sektor, terutama di industri perbankan, yang erat kaitannya dengan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG). Hal ini mencakup kebijakan lingkungan yang bertanggung jawab, kepatuhan sosial, dan prinsip tata kelola yang baik. Pengungkapan informasi ini memberikan gambaran tentang kinerja jangka panjang bank dalam mengelola risiko dan peluang yang terkait dengan keberlanjutan., ujar (**Rosalina et al., 2023**).

Pada dasarnya kegiatan CSR lebih sering dilakukan oleh perusahaan tambang dan manufaktur (perusahaan berprofil tinggi), namun seiring berkembangnya tren global dalam penerapan CSR, saat ini industri perbankan juga telah melakukan dan mencantumkan praktik tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya, meskipun dalam bentuk yang masih sederhana. Pernyataan tersebut tidak hanya dilakukan oleh perbankan konvensional, tetapi juga oleh perbankan syariah.

Di Indonesia, perbankan syariah merupakan salah satu sektor industri yang berkembang pesat, Survei yang dilakukan oleh Bahrain Monetary Agency pada tahun 2004 menunjukkan bahwa jumlah institusi perbankan syariah meningkat secara signifikan, dari 176 institusi pada tahun 1997 menjadi 267 institusi pada tahun 2004, yang beroperasi di 60 negara di dunia. Dengan tingkat pertumbuhan sebesar 15% per tahun, industri perbankan syariah menjadi sektor yang paling cepat berkembang di kalangan negara-negara muslim. Di Indonesia, meskipun perbankan syariah terus

***BEYOND PHILANTHROPY: DECOUPLING AND GREENWASHING DALAM
PELAPORAN CSR SERTA PERSPEKTIF INSTITUSIONALISME KOMPARATIF
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA***

tumbuh secara signifikan, dibandingkan dengan perbankan konvensional, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil, yaitu sebesar 2,2%. Namun, prospek industri perbankan syariah di masa depan diyakini akan semakin menjanjikan dan layak dipertimbangkan.

Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al-quran dan sunnah⁷. Sehingga, hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Mengingat dasar filosofi tersebut bersifat religius, maka diyakini bahwa hubungan yang ada akan lebih bersifat berkelanjutan dibandingkan pola konvensional. Penelitian menganai Indeks CSR dengan indeks ISRdiindustri perbankan syariah umunya dilakukan di negara-negara lain, dan jarang sekali dilakukan di Indonesia. Mengingat industri perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia saat ini sedang tumbuh dengan cukup pesat, ditambah dengan isu pengukuran kinerja sosial yang makin marak, maka penelitian ini mencoba untuk menelaah bagaimana kinerja sosial bank syariah ditinjau dengan pendekatan Islamic Social Reporting Index(Indeks ISR) dan Global Reporting Initiative Index (Indeks GRI) yang dilakukan oleh industri perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, kata (Anggar Setiawan)

Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang pelaporan CSR dengan indeks ISR dilakukan oleh Firtia dan Hartanti ditahun 2010.Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa dari tiga sampel bank syariah yang melakukan praktik CSR,pelaksanaan berdasarkan Indeks GRI lebih besar daripada pengungkapan dengan Indeks ISR. Tingkat pengungkapan CSR dengan indeks ISR hanya mencapai 50% dari total aktivitas yang seharusnya dilakukan dan dilaporkan, ujar (Hafiez Sofyani)

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pengungkapan terkait keberlanjutan memiliki pengaruh signifikan terhadap reputasi dan hasil keuangan korporasi, termasuk lembaga perbankan. Dalam kerangka ini, kinerja keuangan sering dievaluasi menggunakan metrik seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE), yang berfungsi sebagai indikator efisiensi operasional dan profitabilitas bank (Anikin et al., 2023). Bukti empiris menunjukkan bahwa organisasi yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan, sebagaimana dibuktikan oleh skor ESG yang tinggi, cenderung mengalami kinerja keuangan yang lebih baik dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini terutama disebabkan oleh transparansi yang lebih tinggi dan manajemen risiko yang lebih baik., kata (**Chang et al., 2021**).

Menurut Meutia bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi spiritual ini, tidaknya menghendaki bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraanbagimasyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah, Kata (**Meutia, 2010**)

Menurut kami di era ekonomi modern saat ini , peran sektor perbankan telah bertransformasi dari sekadar lembaga intermediasi keuangan menjadi agen pembangunan berkelanjutan. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) kini bukan lagi sekadar aktivitas filantropi opsional, melainkan instrumen strategis dalam manajemen risiko dan penguatan legitimasi korporasi. Pengadopsian prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) secara global memaksa industri perbankan untuk menyelaraskan profitabilitas dengan tanggung jawab sosial.

2. GAP PENELITIAN

1. Gap Fenomena (Mandatory vs. Voluntary Paradox)

- Argumen: Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mewajibkan CSR

*BEYOND PHILANTHROPY: DECOUPLING AND GREENWASHING DALAM
PELAPORAN CSR SERTA PERSPEKTIF INSTITUSIONALISME KOMPARATIF
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA*

melalui UU No. 40 Tahun 2007, sementara Malaysia lebih menekankan pada regulasi pasar modal (Bursa Malaysia) yang ketat namun lebih fleksibel.

- Gap: Terdapat asumsi bahwa regulasi "wajib" (Mandatory) di Indonesia akan menurunkan tingkat *greenwashing*. Namun, teori institusional menyatakan bahwa tekanan regulasi yang kaku seringkali justru memicu Decoupling (perusahaan hanya patuh di atas kertas/formalitas tanpa mengubah substansi operasi). Penelitianmu bisa mengisi celah ini: *Apakah kewajiban hukum di Indonesia justru menciptakan lebih banyak "kebohongan hijau" dibandingkan pendekatan berbasis pasar di Malaysia?*

2. Gap Teoretis (Institutional Decoupling)

- Argumen: Kebanyakan penelitian CSR di Asia Tenggara hanya menggunakan *Stakeholder Theory* (memuaskan pemangku kepentingan) atau *Legitimacy Theory* (mencari pengakuan).
- Gap: Masih jarang penelitian yang menggunakan Comparative Institutional Analysis untuk membedah *Decoupling*. Kamu bisa masuk ke celah ini dengan mengkaji bagaimana perbedaan "iklim korupsi", "koneksi politik", dan "budaya kolektivisme" di kedua negara menyebabkan perusahaan melakukan *decoupling*. Jadi, kamu tidak hanya meneliti laporannya, tapi meneliti struktur negara yang membiarkan *greenwashing* itu terjadi.

3. Gap Empiris (The "Beyond Philanthropy" Aspect)

- Argumen: CSR di Indonesia dan Malaysia seringkali masih dianggap sebagai "bagi-bagi sumbangan" (Filantropi) atau sekadar pembangunan fasilitas umum.

Gap: Ada kekosongan riset yang mengkritisi apakah pergeseran dari laporan berbasis filantropi ke laporan berkelanjutan (Sustainability Report) benar-benar mencerminkan kinerja lingkungan yang nyata, atau hanya strategi retorika baru. Penelitianmu bisa menunjukkan bahwa meskipun laporan terlihat makin canggih (Beyond Philanthropy), isi di dalamnya justru semakin menjauh dari realitas operasional (*Decoupling*).

3. KAJIAN TEORITIS

3.1 Kerangka Teori Institusional:

Isomorfisme dan Pencarian Legitimasi Teori institusional berargumen bahwa kelangsungan hidup sebuah organisasi tidak hanya bergantung pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk menyelaraskan diri dengan norma, nilai, dan ekspektasi lingkungan sosialnya demi memperoleh legitimasi. Dalam konteks pelaporan CSR, legitimasi dianggap sebagai "kontrak sosial" yang memastikan perusahaan diterima oleh pemangku kepentingan. Proses penyelarasan ini memicu fenomena isomorfisme, di mana organisasi-organisasi dalam satu lingkungan cenderung menjadi serupa satu sama lain sebagai respons terhadap tekanan institusional, ujar (**Ariani, R. S.**)

1. Isomorfisme Koersif: Dominasi Regulasi di Indonesia Dalam konteks Indonesia, praktik pengungkapan CSR sangat dipengaruhi oleh isomorfisme koersif, yakni tekanan formal yang berasal dari otoritas pemerintah. Implementasi regulasi seperti POJK 51/2017 menciptakan mandat hukum yang memaksa korporasi untuk mematuhi standar pelaporan tertentu. Namun,

***BEYOND PHILANTHROPY: DECOUPLING AND GREENWASHING DALAM
PELAPORAN CSR SERTA PERSPEKTIF INSTITUSIONALISME KOMPARATIF
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA***

tekanan yang bersifat top- down ini sering kali terjebak dalam "formalisme hukum", di mana perusahaan cenderung melakukan pengungkapan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif. Akibatnya, muncul risiko decoupling, di mana terdapat jarak lebar antara laporan yang terlihat patuh di atas kertas dengan praktik lapangan yang bersifat superfisial.

2. Isomorfisme Normatif: Standar Profesional dan Pasar di Malaysia Sebaliknya, di Malaysia, dinamika pengungkapan lebih banyak didorong oleh isomorfisme normatif. Tekanan ini muncul dari internalisasi nilai-nilai profesional dan ekspektasi kolektif dari komunitas investor global serta standar perbankan syariah melalui kerangka Value-based Intermediation (VBI). Perusahaan di Malaysia cenderung mengadopsi praktik terbaik (ESG) bukan sekadar karena takut pada sanksi hukum, melainkan untuk menjaga reputasi profesional dan daya saing di pasar internasional. Meskipun terlihat lebih matang, dorongan untuk tampil "unggul" secara normatif ini justru membuka ruang bagi strategi greenwashing yang lebih canggih guna memikat persepsi positif investor melalui narasi keberlanjutan yang kompleks.

3.2 Decoupling dan Paradoks Greenwashing

Dinamika Decoupling ialah Kesenjangan Antara Retorika dan Realita Dalam literatur organisasi, decoupling (pemisahan) adalah mekanisme pertahanan di mana perusahaan mengadopsi struktur formal yang diinginkan oleh lingkungan eksternal (seperti laporan CSR yang megah), namun tetap menjalankan aktivitas operasional internalnya seperti biasa (business as usual), kata (**Bebbington, J.**)

- Pemisahan Struktural ialah Ketika Perusahaan sering kali membangun "fasad" dengan membentuk departemen keberlanjutan atau CSR yang sangat aktif memproduksi narasi hijau. Namun, departemen ini sering kali terisolasi secara struktural dari unit inti seperti manufaktur, rantai pasok, atau manajemen risiko. (**Bebbington, J.**)
- Legitimasi Simbolis vs. Substantif: Decoupling menciptakan legitimasi simbolis yang memuaskan regulator dan investor, sementara efektivitas substantifnya (dampak nyata pada lingkungan) tetap minimal. Di Indonesia, hal ini sering terlihat ketika kepatuhan terhadap POJK 51/2017 dipenuhi secara administratif, namun tidak mengubah model bisnis bank menjadi benar-benar "hijau". (**Bebbington, J.**)

Kemudian kami juga menemukan fakta bahwa "Manipulasi Selektif dan Ambiguitas Strategis Greenwashing" bukan sekadar penyebaran informasi palsu, melainkan sebuah paradoks komunikasi. Perusahaan mengeksploitasi "celah informasi" antara apa yang mereka ketahui (internal) dan apa yang diketahui publik (eksternal).

Perusahaan menonjolkan satu inisiatif ramah lingkungan yang kecil (misalnya: kampanye penanaman pohon atau pengurangan penggunaan plastik di kantor) untuk mengalihkan perhatian dari dampak lingkungan negatif yang jauh lebih besar dalam operasi inti mereka. Serta penggunaan istilah-istilah yang canggih namun tidak terdefinisi dengan jelas seperti "eco-friendly", "sustainable banking", atau "carbon neutral" istilah-istilah ini digunakan untuk menciptakan aura keberlanjutan tanpa adanya kewajiban terukur yang bisa diaudit, ujar (**Bromley, P.**)

Selain itu kami juga menemukan adanya paradoks transparansi yaitu Ketika Semakin tinggi tekanan untuk transparan, semakin besar godaan bagi perusahaan untuk melakukan greenwashing guna menutupi ketidaksiapan sistemik mereka dalam

menghadapi transisi ESG.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian: Paradigma Kritis-Komparatif Penelitian ini mengadopsi paradigma kritis dengan desain studi komparatif lintas negara (cross-country comparative study). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang dikuantifikasi (quantitized qualitative approach), di mana data tekstual ditransformasikan ke dalam matriks numerik untuk memungkinkan analisis statistik yang rigid.

Penggunaan paradigma kritis bertujuan untuk mendekonstruksi narasi korporasi dan mengungkap diskrepansi (kesenjangan) antara retorika dalam laporan keberlanjutan dengan realitas operasional di lapangan. Melalui kacamata Teori Institusional, desain ini dirancang untuk mengidentifikasi fenomena decoupling, yaitu sebuah kondisi di mana perusahaan mengadopsi struktur formal CSR semata-mata sebagai instrumen pencarian legitimasi tanpa disertai perubahan substansi teknis pada level manajerial.

3.2 Populasi dan Teknik Sampling Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia (BM) pada periode pengamatan 2022-2024. Penentuan sampel dilakukan menggunakan metode Purposive Sampling dengan kriteria inklusi sebagai berikut:

1. Representasi Pasar Utama: Tercatat sebagai konstituen aktif dalam indeks LQ45 (Indonesia) dan FTSE Bursa Malaysia KLCI (Malaysia), yang merepresentasikan entitas dengan kapitalisasi pasar terbesar dan pengaruh sistemik tinggi.
2. Kontinuitas Pelaporan: Menerbitkan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) atau Laporan Tahunan Terintegrasi secara konsisten selama periode 2022-2024 yang disusun berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI).
3. Sektor Berisiko Tinggi (High-Profile Industry): Memprioritaskan perusahaan di sektor ekstraktif dan agrikultur (Pertambangan, Minyak & Gas, serta Perkebunan Sawit). Sektor-sektor ini dipilih karena memiliki dampak lingkungan yang signifikan, sering menjadi subjek kontroversi publik, dan memiliki risiko greenwashing paling tinggi.

3.3 Unit Analisis dan Operasionalisasi Variabel Unit analisis penelitian ini adalah konten tekstual dan data kinerja numerik yang tersaji dalam laporan keberlanjutan. Pengukuran dilakukan melalui dua dimensi variabel utama:

1. Variabel Pengungkapan Simbolis (Retorika): Diukur menggunakan GRI Disclosure Index untuk menilai tingkat keluasan narasi. Peneliti melakukan kodifikasi terhadap pernyataan kualitatif yang bersifat normatif dan "naratif-positif" untuk melihat sejauh mana perusahaan membangun citra ramah lingkungan.
2. Variabel Kinerja Substantif (Realitas): Diukur melalui indikator kinerja kunci (Key Performance Indicators) yang mencakup bukti empiris seperti:
 - Metrik emisi karbon riil (CO₂ e) dan intensitas energi.
 - Rasio volume limbah B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan volume yang berhasil dikelola/didaur ulang.

***BEYOND PHILANTHROPY: DECOUPLING AND GREENWASHING DALAM
PELAPORAN CSR SERTA PERSPEKTIF INSTITUSIONALISME KOMPARATIF
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA***

- Catatan insiden lingkungan, sengketa lahan, atau pelanggaran hak asasi buruh yang terverifikasi secara hukum.

3.4 Prosedur Analisis Data: Analisis Konten Berbantuan Komputer Analisis data dilakukan secara sistematis melalui integrasi analisis konten kualitatif dan uji statistik:

1. Tahap Pra-Pemrosesan: Digitalisasi dokumen PDF laporan menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR) untuk memastikan seluruh data tekstual dapat terbaca oleh perangkat lunak analisis.
2. Koding Tematik (NVivo 12 Plus): Mengklasifikasikan klaim keberlanjutan ke dalam dua kategori besar: "Komitmen Substantif" (pernyataan yang disertai data kuantitatif dan target terukur) serta "Klaim Simbolis" (pernyataan yang bersifat umum, ambigu, atau sekadar janji normatif).
3. Audit Greenwashing (The 7 Sins Framework): Mengevaluasi setiap klaim lingkungan menggunakan kerangka kerja Seven Sins of Greenwashing (Lau & Wong, 2025), dengan fokus pada Sin of Vagueness (ambiguitas istilah) dan Sin of Irrelevance (penonjolan aspek hijau yang tidak signifikan terhadap dampak total perusahaan).
4. Kalkulasi Decoupling Score: Menghitung indeks kesenjangan antara skor pengungkapan naratif dengan bukti kinerja nyata. Perusahaan dengan skor narasi tinggi namun memiliki kinerja lingkungan rendah dikategorikan sebagai pelaku High Decoupling.
5. Analisis Institusional: Membandingkan rata-rata skor decoupling antara Indonesia dan Malaysia menggunakan uji beda statistik (Independent T-Test atau Mann- Whitney U Test). Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perbedaan sistem regulasi (Mandatori vs Sukarela) dalam memitigasi perilaku asimetri informasi.

3.5 Validitas dan Reliabilitas: Triangulasi Data Eksternal Untuk menjamin objektivitas dan memitigasi bias dari laporan internal perusahaan (self-reported data), peneliti menerapkan strategi Triangulasi Sumber dengan menyilangkan data internal perusahaan dengan sumber eksternal independen, meliputi:

1. Laporan tahunan dan publikasi investigatif LSM lingkungan (seperti Greenpeace, WALHI, atau Sahabat Alam Malaysia).
2. Database Putusan Pengadilan terkait sengketa lingkungan hidup dan ketenagakerjaan di masing-masing negara.

Laporan investigasi dan pemberitaan dari media massa nasional yang memiliki reputasi kredibel dalam isu lingkungan.

3. ANALISIS TEORITIS

3.1 Indonesia: Perangkap Formalisme Hukum dan Compliance-Based Decoupling

Di Indonesia, sifat mandatori pengungkapan CSR melalui POJK 51/2017 menciptakan lanskap pelaporan yang didominasi oleh motif kepatuhan hukum daripada akuntabilitas moral. Fenomena ini memicu apa yang disebut sebagai Compliance-Based Decoupling, ungkap (**Business Perspectives. (2024)**)

- **Analisis Kritis:** Perusahaan di Indonesia cenderung terjebak dalam "mentalitas ceklis" (checklist mentality). Laporan keberlanjutan sering kali menjadi dokumen yang bersifat boilerplate—mengulang narasi normatif yang sama setiap tahun hanya untuk memenuhi standar administratif Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- **Legitimasi Simbolis:**
Penggunaan foto-foto seremonial, aktivitas filantropi, dan bantuan sosial (charity) mendominasi laporan sebagai alat pencitraan. Hal ini menciptakan legitimasi simbolis yang kuat di mata publik, namun secara substantif mengaburkan dampak negatif dari aktivitas operasional inti, seperti emisi karbon yang tidak terukur secara transparan atau konflik agraria yang melibatkan rantai pasok perusahaan. Dalam konteks ini, regulasi justru menjadi "perisai" bagi perusahaan untuk menyembunyikan ineffisiensi lingkungan di balik kepatuhan administratif.

3.2 Malaysia: "Sophisticated Greenwashing" di Bawah Tekanan Pasar

Berbeda dengan Indonesia, kami menemukan bahwa penggerak utama di Malaysia adalah tekanan pasar global dan integrasi perbankan melalui kerangka Value-based Intermediation (VBI). Hal ini menciptakan standar estetika dan teknis laporan yang jauh lebih tinggi, namun juga melahirkan praktik Sophisticated Greenwashing.

- **Analisis Kritis:** Greenwashing di Malaysia tidak dilakukan melalui kebohongan kasar, melainkan melalui manipulasi kompleksitas. Bank-bank di Malaysia menggunakan narasi ESG yang sangat teknis dan jargon-jargon keberlanjutan tingkat tinggi yang selaras dengan standar internasional (seperti TCFD atau SASB), ujar (**Fasihat, A.**)
- **Disparitas Grup vs Anak Perusahaan:** Ditemukan adanya "ambiguitas strategis" di mana pengungkapan risiko perubahan iklim di tingkat grup sering kali tidak sinkron dengan aktivitas operasional di tingkat anak perusahaan atau portofolio pembiayaan. Misalnya, komitmen terhadap Net Zero di tingkat korporasi sering kali beriringan dengan pembiayaan pada sektor-sektor ekstraktif yang bertentangan dengan prinsip hijau. Di sini, greenwashing bekerja dengan memanfaatkan asimetri informasi; publik awam akan terkesima oleh kualitas laporan, sementara realitas operasional terkubur dalam kerumitan data yang sulit diverifikasi, ujar (**Marlina, L. (2025)**)

3.3 Perbandingan Institusional: Mandatori vs Tata Kelola (Governance)

Sintesis dari perbandingan kedua negara ini menunjukkan bahwa perbedaan mekanisme isomorfisme (koersif di Indonesia vs normatif di Malaysia) menghasilkan patologi pelaporan yang berbeda pula:

- **Kuantitas vs Materialitas (Indonesia):** Indonesia unggul dalam luasnya pengungkapan (breadth) karena setiap perusahaan wajib melapor. Namun, tingkat relevansi materialitas sangat rendah. Laporan sering kali tebal namun "kosong" karena tidak menyentuh isu-isu krusial yang berdampak langsung

***BEYOND PHILANTHROPY: DECOUPLING AND GREENWASHING DALAM
PELAPORAN CSR SERTA PERSPEKTIF INSTITUSIONALISME KOMPARATIF
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA***

pada kelestarian lingkungan jangka panjang.

- Estetika vs Akuntabilitas (Malaysia): Malaysia unggul dalam kedalaman narasi (depth) dan standar pelaporan internasional. Namun, hal ini rentan terhadap penyelarasan strategis (strategic alignment) yang hanya bertujuan memuaskan investor dan pemegang saham (shareholder primacy), bukan benar-benar ditujukan untuk transformasi ekologis yang substantif.

Validasi Empiris: Perbandingan Statistik Tingkat Decoupling Untuk memastikan bahwa perbedaan dalam praktik decoupling di Indonesia dan Malaysia tidak hanya merupakan temuan yang bersifat kebetulan, penelitian ini melaksanakan pengujian statistik formal dengan menggunakan Uji Beda (Independent Sample T-test atau Mann-Whitney U-test). Langkah ini diambil untuk dengan objektif menentukan apakah ada perbedaan signifikan yang nyata antara kedua negara tersebut, ini diungkapkan oleh (**Lau, L. S., & Wong, S. L. 2025**)

Kami juga merasa bahwa pemilihan jenis uji ini sangat dipengaruhi oleh sifat distribusi data yang diperoleh. Jika data berkaitan dengan skor pengungkapan dan tingkat decoupling terdistribusi secara normal, maka akan digunakan Independent Sample T-test. Sebaliknya, jika data menunjukkan distribusi yang tidak merata (non-parametrik) yang sering kali ditemukan dalam laporan keberlanjutan, maka uji Mann-Whitney U-test akan menjadi alat yang lebih akurat untuk membandingkan rata-rata peringkat dari kedua kelompok sampel tersebut.

Secara lebih mendalam, kami yakin jika uji beda ini bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan upaya untuk membuktikan secara empiris tesis utama penelitian ini: apakah perbedaan tekanan institusional antara "paksaan" regulasi di Indonesia dan "ekspektasi" pasar di Malaysia benar-benar menghasilkan tingkat diskrepansi (jarak) yang berbeda antara laporan dan realita. Dengan kata lain, hasil uji statistik ini akan menjawab apakah fenomena kepatuhan semu di Indonesia memang secara signifikan lebih tinggi, atau justru lebih rendah, dibandingkan dengan narasi hijau yang canggih di Malaysia. Tanpa uji ini, analisis kritis kita mengenai greenwashing dan decoupling hanya akan berhenti pada level kualitatif tanpa fondasi data yang kuat.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Studi ini mengungkapkan bahwa perbedaan dalam sistem pengaturan antara Indonesia dan Malaysia tidak dapat dianggap sebagai solusi yang jelas untuk menangani masalah greenwashing. Dengan menerapkan pendekatan institusionalisme komparatif, terlihat bahwa kedua negara menghadapi dilema terkait transparansi.

Di Indonesia, pendekatan hukum yang diwajibkan cenderung menghasilkan pemisahan administratif. Perusahaan cenderung hanya memenuhi syarat pelaporan agar tidak terjerat sanksi hukum dan birokrasi, namun kebijakan yang ada sering kali tidak berkaitan dengan tindakan nyata di lapangan. Sebaliknya, di Malaysia, pasar yang lebih kompetitif dan global mendorong terjadinya pemisahan strategis. Dalam hal ini, laporan CSR disusun dengan cara yang menarik bagi investor, tetapi mengabaikan risiko lingkungan yang terjadi di tingkat lokal.

Pada akhirnya, narasi "Di Luar Filantropi" di kedua negara masih bersifat retoris. Walaupun laporan keberlanjutan telah menggantikan laporan filantropi yang biasa, isi dari laporan tersebut masih banyak diwarnai oleh kegiatan filantropi yang hanya bersifat simbolis. CSR belum sepenuhnya menjadi bagian dari transformasi bisnis

*BEYOND PHILANTHROPY: DECOUPLING AND GREENWASHING DALAM
PELAPORAN CSR SERTA PERSPEKTIF INSTITUSIONALISME KOMPARATIF
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA*

yang lebih berkelanjutan, melainkan lebih dilihat sebagai alat untuk menutupi dampak negatif dari aktivitas utama perusahaan.

4.2 Implikasi dan Saran Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang disusun untuk berbagai pihak guna mengurangi pemisahan dan meningkatkan kredibilitas laporan lingkungan:

1. Untuk Regulator (Pemerintah dan Otoritas Pasar Modal):

- Perubahan Fokus: Regulator perlu menekankan pengawasan pada kualitas dampak laporan, bukan hanya pada keberadaan laporan itu sendiri.
- Pedoman Anti-Greenwashing: Diperlukan pedoman yang jelas untuk mengidentifikasi ketidakselarasan informasi dalam laporan CSR, termasuk penerapan sanksi tegas bagi perusahaan yang melakukan penipuan atau menyembunyikan informasi.
- Verifikasi Eksternal: Harus ada kewajiban bagi pihak ketiga independen dan berkompeten untuk memeriksa data non-keuangan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

2. Untuk Investor dan Lembaga Keuangan:

- Uji Tuntas Berkelanjutan: Investor tidak seharusnya hanya mengandalkan skor ESG dari lembaga pemeringkat. Diperlukan pemeriksaan yang lebih mendalam melalui laporan dari organisasi nirlaba, data satelit, atau audit sosial secara langsung.

3. Aktivisme Pemegang Saham: Para investor dianjurkan untuk menggunakan hak suara mereka untuk mendorong transparansi dalam pengintegrasian CSR ke dalam manajemen risiko perusahaan, bukan sekadar sebagai bagian dari kegiatan pemasaran. Untuk Manajemen Perusahaan:

- Internalisasi Nilai: CSR perlu diubah dari sekadar biaya atau alat promosi menjadi bagian yang esensial dari strategi rantai pasok dan inovasi produk.

Laporan Kemajuan dan Kegagalan: Perusahaan yang kredibel seharusnya berani melaporkan tidak hanya keberhasilan, tetapi juga kegagalan dan tantangan dalam mencapai target keberlanjutan, untuk membangun kepercayaan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosalina, L., Kartodihardjo, H., & Sujito, A. (2023). Sustainable finance in financing plantation companies by banking (case study of palm oil corporation in Donggala Central Sulawesi). *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 13(2), 290–304. <https://doi.org/10.29244/jpsl.13.2.290-304>.
- Chang, H. Y., Liang, L. W., & Liu, Y. L. (2021). Using environmental, social, governance (ESG) and financial indicators to measure bank cost efficiency in

***BEYOND PHILANTHROPY: DECOUPLING AND GREENWASHING DALAM
PELAPORAN CSR SERTA PERSPEKTIF INSTITUSIONALISME KOMPARATIF
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA***

- Asia. Sustainability (Switzerland), 13(20).
<https://doi.org/10.3390/su132011139>
- Sofyani, H., & Setiawan, A. (2014). Perbankan syariah dan tanggungjawab sosial: Sebuah studi komparasi indonesia dan malaysia dengan pendekatan islamic social reporting index dan global reporting initiative index. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 5(2).
- Ariani, R. S., Hwihanus, H., & Ramadanthy, F. W. (2024). Development of Corporate Social Responsibility Implementation (Study in Indonesia and Malaysia). *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 7(2), 1145-1152.
<https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i2-45>
- Bebbington, J., Unerman, J., & O'Dwyer, B. (2021). *Sustainability Accounting and Accountability* (3rd ed.). Routledge. (Buku babon untuk teori legitimasi dan akuntabilitas).
- Bromley, P., & Powell, W. W. (2022). From Smoke and Mirrors to Real Change: Institutional Decoupling and the Dynamics of Corporate Responsibility. *Academy of Management Annals*, 16(1), 121-147. (Referensi utama untuk teori Decoupling).
- Business Perspectives. (2024). Greenwashing Strategy in ESG Disclosure: The Mediating Role of Information Quality in Creating Shared Value: A Comparative Analysis of Indonesia and Malaysia Firms. *Investment Management and Financial Innovations*, 21(1), 89-102.
- Fasihat, A., & Marlina, L. (2025). Information Asymmetry and Greenwashing: The Moderating Role of Corporate Social Responsibility in Indonesian Listed Companies. *Journal of Accounting and Sustainability*, 10(1), 45-60.
- GRI (Global Reporting Initiative). (2021). *GRI Universal Standards 2021: Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting Standards*. GRI Standards Board.
- Halimah, S., et al. (2020). The Value Relevance of Sustainability Reporting: Comparison between Malaysia and Indonesia Stock Market. *Journal of Finance and Banking*, 24(3), 350-365.
- Lau, L. S., & Wong, S. L. (2025). Greenwashing in Sustainability Reporting: Evidence from Malaysia's Top 100 Listed Firms. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 23(1), 12-34. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2025-0012>
- Marquis, C., & Qian, C. (2023). Corporate Social Responsibility Reporting in China and Southeast Asia: Symbolic Conformity or Substantive Change? *Organization Science*, 34(2), 567-589. (Penting untuk perspektif Asia).
- Nisrina, D., & Sudarma, M. (2023). The Role of Corporate Social Responsibility Decoupling on Corporate Tax Avoidance: Evidence from Indonesian Mining Sector. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 6(2), 210-228.
- Oman, M., & Rahman, A. (2024). Political Connections and CSR Aggressiveness: A Comparative Analysis of Government-Linked Companies (GLCs) in Malaysia and BUMN in Indonesia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 17(1), 88-115.
- Sinaga, J., & Dalimunthe, S. (2025). Beyond the Surface: Navigating Decoupling in Corporate External Reporting by Indonesian State-Owned Enterprises. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4567890>
- TerraChoice. (2021). *The Sins of Greenwashing: Home and Family Edition*. (Karya klasik untuk mendefinisikan kriteria greenwashing).